KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Setelah Enam Dekade Jakarta Menjadi Ibu Kota Negara
Tanggal : Minggu, 30 Juni 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

CATATAN URBAN

Setelah Enam Dekade Jakarta Menjadi Ibu Kota Negara

Neli Triana

Apakah Nusantarasentris kelak bisa menepis Jakartasentris atau sekadar menduplikasinya dengan bungkus yang berbeda?

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Secara *de facto*, saat itu juga, Jakarta menjadi ibu kota negara.

Sepanjang 19 tahun usai kemerdekaan, kondisi negara masih belum stabil. Kedatangan kembali Pemerintah Hindia Belanda ke Jakarta membuat pemimpin negeri kala itu diam-diam memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, lahirlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) beribu kota di Bukittinggi per 19 Desember 1948. Setahun kemudian, pada 27 Desember 1949, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil dari Konferensi Meja Bundar.

Di ulang tahun kemerdekaan kelima, RIS berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950. Ibu kota negara kembali ke Jakarta.

Susan Blackburn dalam bukunya, *Jakarta, Sejarah 400 Tahun*, memuliskan, Soekarno bertekad memberikan gambaran modern bagi Jakarta merdeka yang difokuskan di Jalan Thamrin yang membentang dari sudut barat daya Lapangan Merdeka menuju Jalan Sudirman dan Kebayoran Baru.

"Daerah ini bersih dari konotasi kolonial, serta akan menampilkan karya-karya hebat para arsitek dan kontraktor Indonesia," tulis Blackburn.

Sebelumnya, Jakarta identik dengan Batavia, kota buatan Belanda dengan poros pembangunan di kawasan Kota kemudian beralih ke Gambir hingga Jatinegara.

Kutipan pidato Soekarno pada tahun 1962 memperkuat pernyataan Blackburn. Sebagian kutipannya, yaitu "Berikan Djakarta satu tempat yang hebat di dalam kalbu rakyat Indonesia sendiri, sebab Djakarta adalah milik daripada orang-orang Djakarta. Djakarta adalah milik daripada seluruh bangsa Indonesia. Bahkan Djakarta jadi mercusuar daripada perjuangan seluruh umat manusia. Ya, the New Emerging Forces."

Poros baru Jakarta yang meninggalkan jejak penjajah digaungkan ke publik dunia pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Dengan adanya Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya, Gelora Bung Karno, dan gedung-gedung pemerintahan, pusat belanja modern, dan perkantoran di poros barunya, Jakarta mencoba lepas dari bayang-bayang kolonial.

Euforia sentralisasi pembangunan di Jakarta atau Jakartasentris dimulai. Apalagi kemudian, ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. UU ini sekaligus memastikan Jakarta secara *de jure* sah sebagai ibu kota negara.

Jakarta yang memiliki sejarah panjang sejak masa Fatahillah di abad ke-16, moncer di era kolonial dan meredup antara 1940-an dan 1950-an, rakus menikmati keistimewaan baru sebagai ibu kota negara.

Apa yang terjadi di Jakarta menjadi isu nasional. Sosok pemimpin DKI terkenal dan menginspirasi daerah lain di Indonesia. Mereka di antaranya ada Ali Sadikin, Wiyogo Atmodarminto, Sutiyoso, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, juga Anies Baswedan.

Program fenomenal Ali, di antaranya, adalah Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) di tahun 1969. Proyek yang menyasar penataan kampung kumuh ini diadopsi dan diadaptasi oleh gubernur Jakarta lainnya sampai sekarang.

Sutiyoso pada 15 Januari 2004 memastikan Koridor 1 Transjakarta Blok M-Kota mulai beroperasi. Ini menjadi tonggak penataan transportasi publik modern di Jakarta sepanjang 20 tahun selanjutnya.

Pada era Fauzi Bowo, penanggulangan banjir Ibu Kota memasuki babak baru. Kanal banjir timur yang sempat terbengkalai akhirnya tuntas dan beroperasi.

Selanjutnya di bawah komando Joko Widodo, penataan situ, waduk, sungai, hingga hunian di bantaran sungai di Jakarta digalakkan. Infrastruktur lain, seperti jalan tol dan peremajaan pasar, marak dilakukan di masa Jokowi ini.

Dalam kecemasan, publik berharap enam dekade Jakartasentris tidak akan terulang dalam bungkus berbeda di Nusantara.

Basuki Tjahaja Purnama unggul di antaranya di bidang transparansi birokrasi dan pelayanan publik juga penambahan ruang terbuka publik. Anies Baswedan menyabet perhatian dengan penataan kampung kumuh, hunian dengan uang muka Rp 0, dan program lainnya.

Disrupsi Fukuyama

Tidak disangkal wajah kemajuan berskala global sedikit banyak sudah ada di Jakarta saat ini. Namun, memiliki gubernur yang tenar seantero republik tidak serta-merta membuat Jakarta menjadi kota modern impian Soekarno.

Problem Jakarta di masa lalu ternyata tak jauh beda dengan saat ini. Seperti dikutip dari *Djakarta Dalam Angka 1969*, penduduk Jakarta pada 1948 sekitar 823.000 jiwa dan membengkak menjadi 3.813.000 pada 1965. Para pendatang menyesaki Jakarta karena alasan ekonomi.

Pada tahun 1957, diperkirakan ada 10.000 orang yang setiap hari pergi pulang Bogor-Jakarta dengan menggunakan kereta api untuk bekerja. Mereka yang memilih tetap di Jakarta banyak terserap di perkampungan kumuh. Diperkirakan 275.000 orang tinggal di rumah tak sehat.

Di masa kini, setelah setengah abad berlalu dan Jakarta sendiri telah berusia 497 tahun, para komuter tidak hanya dari Bogor, tetapi melebar dan meluas se-Jabodetabek, termasuk menyentuh Puncak (Kabupaten Bogor) dan Cianjur.

Nyaris tidak ada kesinambungan program antara satu gubernur dan gubernur lain. Penataan sepotong-sepotong sehingga penanggulangan suatu masalah berjalan pelan. Pembangunan MRT Jakarta yang digagas sejak pertengahan 1980-an baru terealisasi 35 tahun kemudian. Penanggulangan banjir sampai sekarang belum sepenuhnya tuntas.

Di era kemajuan teknologi, termasuk teknologi informasi, media sosial, dan dunia serba digital, Jakarta menjadi pusat "bencana" benturan ideologi yang rembesannya memengaruhi seluruh negeri.

Apa yang terjadi di Jakarta mirip dengan yang dikemukakan Francis Fukuyama dalam *The Great Disruption* (1999). Dalam makalah yang kemudian menjadi sebuah buku itu, Fukuyama menyatakan menjelang milenium baru, dunia diterpa disrupsi besar-besaran.

Lewat internet, setiap orang bebas mengekspresikan ideologi dan pilihan politiknya, memutuskan berkelompok dan mencapai sesuatu bersama tanpa halangan geografis. Di sisi lain, mudah pula menolak langsung berbagai tawaran dan gagasan.

Berangkat dari perubahan kebebasan di tingkat individu itu terbitlah teori bahwa pemerintah makin sulit menjangkau warganya. Kekacauan terjadi di mana-mana.

Namun, Fukuyama menyatakan, disrupsi ini bukan hal baru dan akan selalu terjadi lagi nanti. Namun, berbagai disrupsi itu tidak akan membawa kekacauan besar jika sebelumnya pembangunan merata di semua daerah.

Ia melihat kegiatan ekonomi penopang Amerika Serikat pada 1950-an-1970-an terpusat di segelintir kota besar. Kota utama seperti New York dan Chicago menjadi pusat ketimpangan di AS. Di sana banyak kasus kriminalitas, penduduk amat padat, pengangguran membludak, isu sosial tinggi.

Untuk mengatasi fenomena itu, pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan penduduk bergerak pindah tersebar ke sejumlah negara bagian. Selain mendirikan pusat kegiatan yang menggerakkan ekonomi baru di luar kota utama, pemerintah memberi insentif dan keistimewaan bagi setiap warga yang mau pindah ke daerah sepi penduduk.

Semenjak 1980-an, pertumbuhan kota-kota di AS disebut relatif setara dan tingkat kesejahteraan warganya merata.

Kebijakan yang mirip kini banyak diterapkan di beberapa negara, seperti Italia dan Jepang. Kedua negara memberi insentif besar bagi kaum muda yang mau pindah ke kawasan-kawasan sepi disertai sejumlah persyaratan.

Mengikis Jakartasentris

Di Indonesia, program desentralisasi yang digulirkan setelah 1998 belum maksimal mengikis Jakartasentris.

Kebijakan pembangunan yang menelurkan konsep megapolitan sampai Jabodetabekpunjur lebih terpaku mewadahi meluas dan melebarnya Jakarta. Kebijakan itu belum secara tegas mengatur tata ruang dengan pembagian fungsi-fungsinya secara jelas, termasuk memastikan daya dukung lingkungan terjamin.

Pengembangan kawasan urban dan pusat perekonomian baru di yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia disinyalir sehatas menduplikasi Jabodetabekpunjur.

Bagaimana dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur? Nusantara kini telah memiliki landasan kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Nusantara digadang-gadang menjadi wajah baru Indonesia. Kota ini menawarkan Indonesiasentris, bukan Jawasentris atau Jakartasentris.

Meskipun menyandang status IKN, Nusantara dan kawasan sekitarnya diproyeksikan pula menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Nusantara akan dikembangkan menjadi kluster berbagai industri hijau dan berkelanjutan, mulai dari farmasi, pertanian, wisata, juga bahan kimia. Selain itu, ada kluster pendidikan abad ke-21 serta kota cerdas dan pusat industri 4.0.

Rencana pembangunan Nusantara itu berbeda dengan Washington DC di AS atau Putra Jaya di Malaysia. Kedua kota itu dibangun dengan fokus pada fungsi utamanya sebagai ibu kota negara.

Dari sisi penyerapan anggaran, dikutip dari Parlementaria pada 24 Desember 2023, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan Nusantara seharusnya memiliki pendanaan seimbang antara APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.

"Namun, sampai tahun 2024, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan menembus Rp 75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran. Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama," kata Said.

Melihat jejak panjang Jakartasentris dan gejala awal yang terjadi di Nusantara, publik pantas khawatir. Dalam kecemasan, publik berharap enam dekade Jakartasentris tidak akan terulang dalam bungkus berbeda di Nusantara.

KOMPAS
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965
Pemimpin Umum: Lilik Oetama
Wakil Pemimpin Umum: Andy Budiman Kurnia, Paulus Tri Agung Kristanto
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Sutta Dharmasaputra
Wakil Pemimpin Redaksi: Adi Prasetyo, A Hanun Biantoro
Redaktur Senior: Nirwan Lesmana, Rikard Bagun, Nirwan Mardiana Rembudy
Redaktur Pelaksana: Marcelius Hermawan
Wakil Redaktur Pelaksana: Andreas Maryoto, Antonius Tomy Trinugroho, Khairunisa
Sekretaris Redaksi: Dewi Indriastuti